



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI SURACHMAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 405911

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 794.500.000**

1. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 79.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 152.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 13.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, LAINNYA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 251.350.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA X ABRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



5. MOBIL, DAIHATSU F69 RVZD (FEROZA) Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. MOTOR, SCOOPY PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.350.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.349.540

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.065.899.540

III. HUTANG Rp. 934.776.060

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 131.123.480

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.